**JIKAP PGSD: Jurnal Ilmiah Ilmu Kependidikan**

Vol, 5. No, 1. Tahun 2021

e-ISSN: 2597-4440 dan p-ISSN: 2597-4424

**updownload_-_Copy3** *This work is licensed under a Creative Commons Attribution*

*4.0 International License*

**IMPLEMENTASI MENAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)**

**DI SEKOLAH DASAR**

**Suardin**1**, Anwar Kapota**2

1Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

2 Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Email: 1[suardinmuh78@gmail.com](mailto:suardinmuh78@gmail.com)

2[kapota.anwar12@gmail.com](mailto:kapota.anwar12@gmail.com)

**Abstrak:** Manajemen berbasis sekolah merupakan kebijakan dan wewenang yang diberikan kepada sekolah untuk merencanakan dan mengelola serta mengembangkan pendidikan sesuai kebutuhan sekolah dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen berbasis sekolah, dengan fokus penelitian pada aspek manajemen kurikulum dan program pengajaran di Sekolah Dasar Negeri 1 Baubau (SDN 1 Baubau). Adapun metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data penelitian diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data penelitian menggunakan analisis data kualitatif interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukan implementasi manajemen berbasis sekolah, bidang manajemen kurikulum dan program pengajaran di SDN 1 Baubau diwujudkan melalui pengembangan kurikulum muatan lokal dengan menetapkan bahasa wolio, seni, budaya dan keterampilan (SBK) berbasis kearifan lokal, sebagai mata pelajaran yang berlaku di sekolah. Implementasi kurikulum muatan lokal Bahasa Wolio dan SBK berbasis kearifan lokal dilaksanakan dengan mekanisme pengelolaan yang baik dan sistematis yaitu melalui perencanaan program pengajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian dan evaluasi hasil belajar. Meski demikian, hasil implementasnya baru terbatas pada ketercapaian aspek konseptual, sedangkan ketercapaian pada aspek kontekstual belum terpenuhi. Untuk itu, perlu adanya perumusan kembali dan perbaikan berkesinambungan implementasi pembelajaran Bahasa Wolio dan SBK berbasis kearifan lokal di SDN 1 Baubau.

**Kata kunci:** *Manajemen Berbasis Sekolah; Kurikulum; Program Pengajaran*

**PENDAHULUAN**

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi yang ditetapkan pemerintah berimplikasi pada meningkatnya tanggungjawab pemerintah daerah. Tidak terkecuali tanggung jawab dalam manajemen pendidikan. Pemerintah daerah dituntut untuk senantiasa secara kreatif dan inovatif meningkatkan kemampuannya dalam berbagai ruang lingkup dan tahap pembangunan pendidikan di daerah, mulai dari tahap perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pada monitoring dan evaluasi. Namun demikian, secara umum dalam implementasinya kebijakan dan pengelolaan pendidikan di daerah, harus tetap sejalan dan searah dengan kebijakan pendidikan nasional. Empat isu kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang perlu direkonstruksi dalam rangka otonomi daerah, yakni berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan pendidikan, relevansi pendidikan, dan pemerataan pelayanan pendidikan (Fauzi, 2019).

Konsekwensi dari adanya kebijakan otonomi daerah, maka dalam bidang pendidikan khususnya dalam pengelolaan sekolah ditetapkanlah kebijakan tentang manajemen berbasis sekolah (MBS). Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Salah satu harapan dari adanya kebijakan manajemen berbasis sekolah adalah terwujudnya pengelolaan pendidikan, khsususnya pendidikan dasar dan menengah yang mampu menggali dan menemukan keunggulan lokal. Sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 50 Ayat (5) bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal (Pasaribu, 2017).

Ketentuan mengenai kebijakan manajemen berbasis sekolah dalam pengelolaan pendidikan dituangkan secara jelas dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain; berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Ssitem Pendidikan Nasional, Pasal 51 Ayat (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah (Hamid, 2018). Sementara itu, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 58B Ayat (1) disebutkan bahwa “pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah menggunakan tata kelola sebagai berikut; (a) Kepala sekolah/madrasah menjalankan manajemen berbasis sekolah/madrasah untuk dan atas nama gubernur/bupati/walikota atau Menteri Agama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Selanjutnya pada Ayat (2) dijelaskan bahwa manajemen berbasis sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewenangan kepala sekolah/madrasah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen, yang meliputi: (a) rencana strategis dan operasional; (b) struktur organisasi dan tata kerja; (c) sistem audit dan pengawasan internal; dan (d) sistem penjaminan mutu internal.

Keutamaan dari implementasi manajemen berbasis sekolah adalah terciptanya kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam pengelolaan sekolah, guna mewujudkan tata kelola pendidikan berkualitas yang berbasis keunggulan lokal daerah (Asbin Pasaribu, 2017). Hal ini sebagaimana penjabaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 58B Ayat (1) huruf (b) yaitu komite sekolah/madrasah memberi bantuan pengarahan, pertimbangan, dan melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap kepala sekolah/madrasah. Selanjutnya pada Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota atau Peraturan Menteri Agama.

Konsep manajemen berbasis sekolah telah diluncurkan oleh pemerintah, dengan harapan dapat diimplementasikan secara konsisten dengan kolaborasi yang baik dan berkualitas antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Manajemen berbasis sekolah merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah (Tombokan, 2007). Mengingat bahwa MBS merupakan paradigma baru dalam pendidikan, maka diperlukan pendayagunaan segala sumber daya sekolah. Untuk itulah sekolah membutuhkan pemimpin yang memiliki pemahaman dan komitmen yang baik serta kreatif dan inovatif dalam mengimplementasikan kepemimpinan sekolah.

Manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggungjawab) lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluesan-keluesan kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (kepala sekolah, guru, karyawan, siswa), dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuan, pengusaha dan sebagainya) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (Adi et al., 2018). (Aziz, 2015a) mengemukakan bahwa MBS adalah manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif untuk memenuhi tujuan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional. Dalam konteks ini, kepala sekolah merupakan kunci sukses terwujudnya implementasi MBS di sekolah. Salah satu program yang menonjol berlakunya kebijakan manajemen berbasis sekolah yaitu kurikulum muatan lokal. Pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah dan sekolah secara penuh untuk mengurus pendidikan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing daerah, dengan merealisasikan kurikulum muatan lokal ( et al., 2020).

Hasil observasi lapangan di beberapa sekolah di kota Baubau dan khususnya di Sekolah Dasar Negeri 1 Baubau, secara totalitas penerapan manajemen berbasis sekolah belum sepenuhnya diimplementasikan. Hal disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya; keterbatasan waktu kepala sekolah dalam melakukan penyesuaian, pemahaman tentang konsep manajemen berbasis sekolah, kesadaran guru untuk menerapkan manajemen berbasis sekolah yang masih kurang, dan ketidaksiapan warga sekolah dalam menerima perubahan dalam pengelolaan sekolah. Namun demikian, untuk implementasi manajemen berbasis sekolah pada bidang kurikulum dan program pengajaran pada Sekolah Dasar se-Kota Baubau pada umumnya dan SDN 1 Baubau pada khususnya telah diimplementasikan, meskipun masih butuh pengembangan ke arah yang lebih baik. Keadaan ini sejalan dengan hasil temuan penelitian, yang menjelaskan bahwa manajemen berbasis kelas belum terimplementasi secara optimal, disebakan oleh beberapa hal, yaitu; (a) warga sekolah (stakeholders) di setiap satuan pendidikan masih memerlukan waktu untuk dapat menerapkan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara utuh dan komprehensif; (b) pemahaman terhadap konsep manajemen yang diterapkan oleh kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, baru dapat dipahami oleh sebagian guru yang ada; (c) peran serta masyarakat terhadap pembangunan pendidikan belum sesuai dengan yang diharapkan dalam konsep MBS, dan bantuan tersebut baru terbatas pada bantuan finansial; (d) visi, misi, dan tujuan sekolah belum sepenuhnya dapat direalisasikan disebabkan oleh masih terbatasnya peranserta masyarakat dilakukan (Ma’mur Sutisna, 2017: 6).

Sementara itu, Indarno dalam Suwandi (2011: 420) menjelaskan bahwa setidaknya terdapat tiga kondisi yang menyebabkan manajemen sekolah tidak efektif, yaitu: (a) pada umumnya kepala sekolah (khususnya sekolah negeri) memiliki otonomi yang sangat terbatas dalam mengelola sekolahnya atau dalam memutuskan pengalokasian sumber daya sekolah; (b) pada sisi kepala sekolah sendiri, mereka kurang memiliki keterampilan untuk mengelola sekolah dengan baik; (c) kecilnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan sekolah, padahal perolehan dukungan dari masyarakat merupakan bagian dari peran kepemimpinan kepala sekolah. Adapun sasaran implementasi manajemen berbasis sekolah meliputi; (1) kurikulum dan program pengajaran, (2) pendidik dan tenaga kependidikan, (3) kesiswaan, (4) keuangan dan pembiayaan, (5) sarana dan prasarana pendidikan, (6) hubungan sekolah dengan masyarakat, (7) manajemen layanan khusus. Manajemen berbasis sekolah merupakan alternatif strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dengan mengelola seluruh komponen/faktor-faktor pendidikan. Pelaksanaan manajemen sekolah yang efektif dan efisien menuntut dilaksanakannya keempat fungsi pokok manajemen secara terpadu dan terintegrasi dalam pengelolaan bidang/komponen pendidikan, keempat fungsi pokok manajemen tersebut yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan. Pada konteks implementasi manajemen berbasis sekolah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bidang kurikulum dan program pengajaran. Oleh karena itu, keempat fungsi pokok manajemen tersebut dapat dikonversi kedalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penilaian kurikulum dan program pengajaran.

Konsep Perencanaan Kurikulum dan Program Pengajaran

Perencanaan merupakan proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Perencanaan juga merupakan kumpulan kebijakan yang secara sistematik disusun dan dirumuskan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dipergunakan sebagai pedoman kerja. Perencanaan merupakan suatu proses dimana program atau kegiatan dirumuskan atau disusun sesuai skala perioritas berdasarkan waktu pelakanaan. Perencanaan memungkin dapat dilaksanakan dalam periode sekarang, mendatang, yang didasarkan pada kesinambungan program secara terus menerus (Sofyan et al., 2021). Perubahan sistem kepemimpinan di sekolah hendaknya menjadikan mutu sebuah sekolah dalam membangun anak didiknya lebih baik dari yang sebelumnya (Pratama, 2020).

Perencanaan dimaknai sebagai proses yang mencakup mendefinisikan sasaran organisasi menetapkan strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran, dan menyusun serangkaian rencana yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan pekerjaan organisasi (Rusniati & Haq, 2014). Philip H. Perencanaan pendidikan sebagai suatu penerapan yang rasional dari proses analisis yang sistematis atas perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan dan tujuan siswa dan masyarakat (Nadlir, 2016). Beeby dalam (World Bank et al., 2018) mendefinisikan perencanaan pendidikan adalah suatu usaha melihat ke masa depan dalam hal menentukan kebijaksanaan prioritas, dan biaya pendidikan yang mempertimbangkan kenyataan keadaan bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk mengembangkan potensi sistem pendidikan nasional memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik.

Dapat dimaknai bahwa perencanaan kurikulum dan program pengajaran merupakan seperangkat rumusan kurikulum yang memuat tujuan, isi dan bahan pelajaran serta rangkaian rancana proses atau cara yang digunakan, yang dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Konsep Pelaksanaan Kurikulum dan Program Pengajaran

Proses implementasi strategi, empat diantaranya yaitu: (1) menganalisis perubahan, bermakna bahwa perusahaan harus menganalisis perubahan yang akan terjadi seandainya formulasi strategi yang telah disepakati bersama diimplementasikan, memperhitungkan secara rinci seberapa besar perusahaan akan berubah, apakah sederhana/tidak ada perubahan yang signifikan, atau kompleks (misalnya perubahan misi perusahaan); (2) menganalisis struktur organisasi, bermakna bahwa perubahan strategi membutuhkan beberapa perubahan dalam organisasi dan keahlian yang dibutuhkan pada posisi-posisi tertentu, yang mengarah pada perubahan struktur organisasi; (3) menganalisis budaya perusahaan, bermakna bahwa pihak manajemen harus melakukan analisis untuk menilai kesesuaian antara rumusan strategi dengan budaya perusahaan. Makin banyak anggota yang menerima nilai-nilai inti yang dianut perusahaan dan merasa sangat terikat kepadanya, maka akan semakin kuat budaya tersebut; (4) Implementasi dan Evaluasi Strategi, bermakna bahwa manajemen harus mempunyai gagasan yang jelas mengenai tingkat perubahan yang diinginkan baik menyangkut struktur organisasi, budaya perusahaan maupun gaya kepemimpinan (Akib, 2012).

Untuk memulai proses implementasi, pihak manajemen harus memperhatikan tiga pertanyaan berikut: (1) siapa yang akan melaksanakan rencana program yang telah diformulasikan? (2) apa yang harus dilakukan? (3) bagaimana sumber daya manusia yang bertanggungjawab dalam implementasi akan melaksanakan berbagai aspek yang diperlukan? (Eddy, 2016: 194). Semua pertanyaan di atas ditujukan untuk mewujudkan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kurikulum dan program pengajaran merupakan seperangkat aktivitas implementasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan memanfaatkan segala sumber daya belajar secara kreatif dan inovatif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Konsep Evaluasi/Penilaian Kurikulum dan Program Pengajaran

Klenowski (2010: 335) menjelaskan bahwa “*Evaluation has been defined as the processes of description, analysis, and judgment of educational programs, practices, institutions, and policies for a range of purposes*”. Evaluasi didefinisikan sebagai proses deskripsi, analisis, dan penilaian program pendidikan, pelaksanaan dan kebijakan lembaga untuk berbagai tujuan. Suharsimi Arikunto (2018: 38-39) menjelaskan bahwa ada satu prinsip umum dan penting dalam kegiatan evaluasi yaitu adanya triangulasi atau hubungan erat tiga komponen, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran (KBM), dan Evaluasi. Selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Hubungan antara tujuan dengan KBM yaitu kegiatan pembelajaran yang dirancang dan disusun dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran mengacu pada tujuan yang hendak dicapai. Dengan makna bahwa KBM mengacu pada tujuan, sebaliknya pula dari tujuan ke KBM; (2) Hubungan antara tujuan dengan evaluasi yaitu evaluasi yang merupakan kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana ketercapaian tujuan. Dengan makna bahwa evaluasi menuju ke tujuan dan di lain sisi ditinjau dari langkah menyusun alat evaluasi ia mengacu pada tujuan yang sudah dirumuskan; (3) Hubungan antara KBM dengan evaluasi yaitu evaluasi harus mengacu atau disesuaikan dengan KBM yang dilaksanakan. Misalnya jika kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan menitikberatkan pada keterampilan, evaluasinya juga harus mengukur tingkat keterampilan siswa, bukannya aspek pengetahuan.

Achmad (2014: 9) mengemukakan bahwa suatu evaluasi yang baik adalah “evaluasi yang sesuai dengan tolok ukur keberhasilan pendidikan yang sudah di tetapkan”. Pada dasarnya dengan evaluasi, sebenarnya kita sedang belajar dan mencoba untuk senantiasa mengkaji dan melakukan penyempurnaan guna memperoleh hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. Sedangkan penilaian adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk memperoleh informasi secara obyektif, berkelanjutan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang dicapai siswa, yang hasilnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan tindakan selanjutnya.

Penilaian berfungsi sebagai: (a) alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional. Dengan fungsi ini maka penilaian harus mengacu kepada tujuan-tujuan instruksional; (b) umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan dapat dilakukan dalam hal tujuan instruksional, kegiatan belajar siswa, strategi mengajar guru, dan lain-lain; dan (c) dasar dalam penyusunan laporan kemajuan siswa kepada orang tuanya (Haris et al., 2018). Ketika segala sumber daya disertakan dalam sebuah proses penilaian, maka fasilitator harus dibentuk untuk membantu para guru mendapatkan umpan balik dari guru-guru lain serta dari para staf, orang tua, siswa. Fasilitator ini bisa membantu para guru untuk mengidentifikasi kebutuhan, memahami proses evaluasi, menyetujui kesimpulan evaluasi tersebut, dan mengembangkan sebuah rancangan bagi pengembangan profesional di masa depan(Sanjaya & Sanjaya, 2008).

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi/penilaian kurikulum dan program pengajaran merupakan kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan penilaian proses dan hasil belajar siswa dengan mengacu pada kriteria dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, yang dapat digunakan sebagai umpan balik perbaikan proses dan pengembangan pembelajaran selanjutnya serta penyusunan laporan kemajuan belajar siswa.

Uraian di atas memberikan informasi betapa pentingnya konsep manajemen berbasis sekolah, meskipun dalam implementasinya belum sepenuhnya sekolah dapat merealisasikannya secara maksimal karena berbagai hambatan kendala yang dijumpai, baik yang sifatnya masalah dari kebijakan pemerintah daerah maupun masalah dalam implementasi di sekolah. Untuk itulah menarik dilakukan penelitian mengenai “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, bidang Kurikulum dan Program Pengajaran di SDN 1 Baubau”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi manajemen berbasis sekolah, ditinjau dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dan evaluasi kurikulum dan program pengajaran di SDN 1 Baubau.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2015: 16). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Adapun sumber data penelitian diperoleh dari hasil wawancara kepada kepala sekolah dan guru di SDN 1 Baubau, hasil observasi aktivitas implementasi MBS di Sekolah, dan hasil telaah sejumlah dokumen manajemen kurikulum dan program pengajaran. Tirangulasi data dilakukan untuk menvalidasi atau menguji keabsahan data penelitian yang diperoleh. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif interaktif Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis (Miles, Huberman, & Rohidi, 2007:19–20). Dalam penelitian ini tiga jenis kegiatan analisis dan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SDN 1 Baubau di wujudkan dalam beberapa program, meskipun belum sepenuhnya dan secara maksimal diwujudkan. Salah satu program yang direalisasikan adalah manajemen kurikulum dan program pengajaran. Hal ini dibuktikan dengan adanya rumusan kurikulum yang berlaku di SDN 1 Baubau, selain muatan kurikulum nasional juga dirumuskan muatan kurikulum lokal yaitu penetapan bahasa Wolio dan suplemen Seni, Budaya dan Keterampilan (SBK) berbasis kearifan lokal sebagai mata pelajaran muatan lokal.

Kebijakan pembelajaran bahasa Wolio dan SBK berbasis kearifan lokal merupakan mata pelajaran muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Baubau. Tujuan dirumuskannya bahasa Wolio sebagai mata pelajaran pada kurikulum sekolah dasar adalah untuk menjaga kelestarian bahasa Wolio sebagai kearifan lokal suku buton yang dinilai terancam punah di tengah arus modernisasi dan globalisasi saat ini. Sementara itu, perumusan SBK diarahkan pada penggalian dan penemuan karya seni, budaya dan kerajinan suku Buton, dengan tujuan untuk melestarikannya dari ancaman kepunahan, serta mempromosikannya sebagai kearifan lokal karya seni, budaya dan keterampilan masyarakat Buton. Secara umum implementasi manajemen kurikulum dan program pengajaran bahasa Wolio dan SBK diwujudkan dalam tiga tahapan kegiatan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dan penilaian.

**Perencanaan Kurikulum dan Program Pengajaran**

Penetapan Kurikulum Bahasa Wolio dan SBK berbasis kearifan lokal yang beralaku di seluruh sekolah dasar, dirumuskan berdasarkan hasil kajian akademik, FGD dan forum ilmiah lainnya yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau. Untuk keperluan operasionalisasinya dilakukan workshop kurikulum muatan lokal bahasa Wolio dan SBK berbasis kearifan lokal, yang diikuti oleh seluruh sekolah se-Kota Baubau untuk menjabarkan dan mengembangkan silabus, kompetensi dasar (KD), dan standar kompetensi lulusan (SKL) berdasarkan tingkat jenjang pendidikan yang ada. Adapun yang menjadi wewenang sekolah dalam perencanaan kurikulum muatan lokal (Bahasa Wolio dan SBK berbasis kearifan lokal) adalah memenuhi persiapan pembelajaran atau perencanaan antara lain; penetapan profil lulusan dan tujuan pembelajaran, penetapan Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM), pengembangan bahan ajar, pengembangan media dan/atau alat peraga pembelajaran, perumusan strategi/metode/model pembelajaran, perumusan rancana pelaksanaan pembelajaran (RPP), perumusan lembar kerja siswa (LKS), Tes soal-soal evaluasi hasil belajar.

Pengambilan keputusan atas seperangkat kegiatan perencanaan kurikulum dan program pengajaran di SDN 1 Baubau sebagaiamana uraian di atas, ditetapkan pada awal Tahun Ajaran dengan melibatkan kepala sekolah, guru, staf, komite sekolah/dewan pendidikan serta pengawas SD melalui rapat tingkat sekolah, guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Selain merencanakan sejumlah ketentuan teknis persiapan implementasi kurikulum muatan lokal, SDN I Baubau juga menyiapkan sejumlah unsur pendukung lainnya, antara lain: menyiapkan guru mata pelajaran, mengalokasikan pendanaan, menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran lainnya. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Aziz, (2015: 77) mengemukakan bahwa perencanaan adalah proses menetapkan tujuan melalui cara atau metode yang tepat dan sistematis untuk mencapai tujuan atau seperangkat tujuan. Melalui perencanaan ini sebuah lembaga pendidikan dapat menyusun prosedur atau metode terbaik dalam menjalankan kegiatan.

**Pelaksanaan Kurikulum dan Program Pengajaran**

Implementasi Kurikulum Bahasa Wolio dan SBK berbasis kearifan lokal di SDN 1 Baubau diawali dengan sosialisasi kepada stakeholder sekolah. Hal ini dilakukan agar semua stakeholder sekolah memiliki kesadaran, kesamaan persepsi, kesiapan, dan memiliki komitmen bersama untuk mensukseskan program pembelajaran Bahasa Wolio dan SBK berbasis kearifan lokal. Sedangkan pelaksanaan pembelajaran Bahasa Wolio dan SBK berbasis kearifan lokal dijalankan sama dengan standar proses pembelajaran kurikulum nasional, baik dari aspek jumlah pertemuan, disiplin dan tata tertib pembelajaran, penggunaan metode, strategi, model, dan pendekatan pembelajaran secara fariatif, serta pemanfaatan sumber-sumber belajar lainnya.

Secara teknis penyajian materi pembelajaran Bahasa Wolio, murid-murid lebih ditekankan pada penguasaan kosa kata, penulisan, dan penyebutan serta tata bahasa. Untuk selanjutnya murid dibimbing dan dilatih berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Wolio. Sedangkan penyajian pembelajaran SBK berbasis kearifal lokal, murid-murid lebih ditekankan pada penguasaan konsep dan jenis kearifan lokal meliputi seni, budaya, dan kerajinan yang merupakan warisan eks kesultanan Buton. Selanjutnya murid dibimbing dan dilatih untuk terampil dalam menampilkan kreasi seni, budaya dan kerajinan lokal kota Baubau yang merupakan pusat pemerintahan eks kesultanan Buton. Adapun guru diberi tanggungjawab menyajikan pengajaran Bahasa Wolio dan SBK adalah oleh guru wali kelas masing-masing di SDN 1 Baubau. Selanjutnya untuk menjamin keterlaksanaan dan keberlangsungan pembelajaran Bahasa Wolio dan SBK, Kepala sekolah SDN 1 Baubau melakukan supervisi dan monitoring di kelas. Hal ini dilakukan sebagaimana halnya pada implementasi pembelajaran mata pelajaran lainnya yang berlaku di SDN 1 Baubau.

Implementasi program kurikulum di atas, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Prananosa et al., 2019) yang menjelaskan bahwa dalam implementasi program di sekolah, kepala sekolah dan guru bebas mengambil inisiatif dan kreatif dalam menjalankan program-program yang diproyeksikan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan proses pembelajaran, sekolah hendaknya menerapkan konsep belajar tuntas (mastery learning). Konsep ini menekankan pentingnya siswa menguasai materi pelajaran secara utuh dan bertahap sebelum melanjutkan ke pembelajaran topik-topik yang lain. Untuk menghindari berbagai penyimpangan kepala sekolah perlu melakukan supervisi dan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan peningkatan mutu yang dilakukan di sekolah.

**Evaluasi/Penilaian Kurikulum dan Program Pengajaran**

Kegiatan evaluasi dan penilalai kurikulum Muatan Lokal Bahasa Wolio dan SBK berbasis kearifan lokal SD Negeri 1 Baubau dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran. Sedangkan penilaian program pengajaran dilaksanakan pada setiap tengah semester melalui Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Kegiatan penilaian itu berupa penilaian ketuntasan hasil belajar Muatan Lokal Bahasa Wolio dan SBK berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan oleh sekolah. Penilaian ini, berimplikasi pada tingkat ketercapaian dan kesesuaian standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan, serta terjadinya proses review kurikulum muatan lokal di SDN 1 Baubau.

Berdasarkan hasil evaluasi hasil belajar, diperoleh data bahwa secara konseptual pembelajaran Bahasa Wolio di SDN 1 Baubau telah memenuhi KKM, namun dalam aspek kemampuan terapan dan praktik penggunaan bahasa wolio bagi murid masih sangat minim, dan cenderung memiliki kesulitan dalam menggunakan bahasa wolio. Keadaan hasil belajar ini menunjukan bahwa pembelajaran bahasa Wolio dapat dinyatakan tuntas dalam tataran konsep sebagai ilmu pengetuhuan, namun belum tuntas dalam dalam tataran konteks aplikatif sebagai bahasa sehari-hari. Sementara itu, untuk hasil belajar SBK berbasis kearifan lokal karya seni, budaya dan keterampilan masyarakat Buton, secara konseptual juga telah memenuhi KKM yang ditetapkan SDN 1 Baubau dan dapat mempromosikanya melalui berbagai lomba yang diikuti oleh murid baik dintingkat lokal, daerah, maupun regional/nasional. Meski demikian, belum dapat dikategorikan mampu melestarikan dari ancaman kepunahan, karena masih banyak karya seni, budaya dan keterampilan masyarakat Buton yang belum tersentuh/tergali bagi program sekolah dasar. Temuan penelitian ini senada dengan pendapat (Suyanto & Jihad, 2011) menjelaskan bahwa inti dari penilaian adalah proses memberikan atau menentukan hasil belajar tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Proses penilaian tersebut berlangsung dalam bentuk interpretasi yang diakhiri dengan judgement. Judgement merupakan tema penilaian yang mengaplikasikan adanya suatu perbandingan antara kriteria dan kenyataan dalam konteks siatuasi tertentu.

Temuan penelitian ini menunjukan bahwa implementasi manajemen berbasis sekolah di SDN 1 Baubau dalam bidang kurikulum dan program pengajaran, telah diwujudkan melalui pelaksanaan kurikulum muatan lokal yakni Bahasa Wolio dan SBK berbasis kearifan lokal, melalui ketetapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau. Ketentuan pemberlakukan muatan lokal Bahasa Wolio dan SBK berbasis kearifan lokal tersebut, oleh SDN 1 Baubau mengimplementasikan kedalam tiga tahapan kegiatan yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Hal ini sejalan pendapat yang dikemukakan oleh Mulyasa (2014: 40) menyatakan bahwa sekolah juga bertugas dan berwewenang untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat. Lebih lanjut dijelaskan manajemen kurikulum dan program pengajaran merupakan bagian dari MBS, mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum.

**SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian beahasan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen berbasis sekolah, bidang manajemen kurikulum dan program pengajaran di SDN 1 Baubau diwujudkan melalui pengembangan kurikulum muatan lokal dengan menetapkan bahasa wolio, dan seni, budaya dan keterampilan (SBK) berbasis kearifan lokal, sebagai mata pelajaran yang berlaku di sekolah. Implementasi kurikulum muatan lokal Bahasa Wolio dan SBK berbasis kearifan lokal ini diwujudkan dengan mekanisme pengelolaan yang baik dan sistematis yaitu melalui perencanaan kurikulum dan program pengajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian dan evaluasi hasil belajar. Meski demikian, hasil implementasnya baru terbatas pada ketercapaian aspek konseptual, sedangkan ketercapaian pada aspek kontekstual belum maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya perumusan kembali dan perbaikan berkesinambungan implementasi pembelajaran Bahasa Wolio dan SBK berbasis kearifan lokal, sebagai kurikulum muatan lokal SDN 1 Baubau

Keterbatasan penulis sangat disadari, sehingga diharapkan ada peneliti lanjutan yang melengkapi kekurangan dari hasil penelitian ini.

**DAFTAR RUJUKAN**

a, A., Mukhtar, M., & a, M. (2020). EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF VILLAGE MIDDLE EDUCATION AND TRAINING PROGRAMS IN BATAM HEALTH TRAINING CENTERS (BAPELKES) IN BATAM CITY PROVINCE OF RIAU ISLANDS. *International Journal of Advanced Research*. https://doi.org/10.21474/ijar01/10319

Achmad, S. (2014). *Evaluasi Pendidikan Menuju Indonesia Madani*. Yayasan Bermula Dari Kanan.

Adi, A., . S., & Eko Widodo, S. (2018). A Evaluation On Training Program Candidates For Head Of School Library to Teachers in Bengkulu Province. *International Journal of Scientific Research and Management*. https://doi.org/10.18535/ijsrm/v6i5.el03

Akib, H. (2012). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*. https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289

Asbin Pasaribu. (2017). IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH. *Journal of Chemical Information and Modeling*.

Aziz, A. Z. (2015a). MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH: ALTERNATIF PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MADRASAH. *El-Tarbawi*. https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol8.iss1.art5

Aziz, A. Z. (2015b). MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah). *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, *17*(2), 601. https://doi.org/10.30863/ekspose.v17i2.117

Fauzi, F. (2019). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). *TARBAWI*. https://doi.org/10.36781/tarbawi.v8i1.3052

Hamid, H. (2018). Manajemen Berbasis Sekolah. *Al-Khwarizmi: Jurnal Pendidikan Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam*. https://doi.org/10.24256/jpmipa.v1i1.86

Haris, A., A’yuna, Q., & Abd, D. (2018). Efektivitas Layanan Konseling Kelompok dalam Mereduksi Perilaku Prokrastinasi Akademik Siswa. *JIMBK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa …*.

Klenowski, V. (2010). *Curriculum Evaluation : Approaches and Methodologies*. 335–341.

Ma’mur Sutisna. (2017). Manajemen Berbasis Sekolah dan Relevansinya di Era Pendidikan Masa Kini. *Biomatika*, *3*.

Nadlir, M. (2016). PERENCANAAN PEMBELAJARAN BERBASIS KARAKTER. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*. https://doi.org/10.15642/pai.2013.1.2.338-352

Pasaribu, A. (2017). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional Di Madrasah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*.

Prananosa, A. G., Wahyudi, M., & Widodo, S. E. (2019). *Model Development of School Database Management Information System*. https://doi.org/10.4108/eai.21-11-2018.2282111

Pratama, F. (2020). KEBIJAKAN KEPEMIMPINAN PERUBAHAN KEPALA SEKOLAH DASAR. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*. https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i3.137

Rusniati, & Haq, A. (2014). Perencanaan strategis dalam perspektif organisasi. *Intekna*.

Sanjaya, W., & Sanjaya, W. (2008). Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan / Wina Sanjaya. *1. MODEL PEMBELAJARAN. BELAJAR DAN MENGAJAR,Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan / Wina Sanjaya*.

Sofyan, Y., Ahmadi, E., & Barlian, U. C. (2021). ANALISIS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN (Suatu Kajian Praktis Dalam Pengeloaan Anggaran Pendidikan Di Sekolah Menengah Umum). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*.

Suyanto, & Jihad, A. (2011). Menjadi Guru Profesioal: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas. In *Penerbit Erlangga*.

Tombokan, A. (2007). Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan Melalui Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah “School Based Management.” *Paper Seminar Sistem Informasi Manajemen*.

World Bank, Wijandi, S., Uppks, S., Pekon, D. I., Kecamatan, W., Timur-depok, D. I. B., Syahza, A., Latifa, T., Keluarga, K., Teknik, F., Padang, U. N., Ii, B. A. B., Hutomo, M. Y., Hidayati, N., Studi, P., Informasi, S., Bina, U., Informatika, S., DIKA AMIR PRATAMA, W., … Fazrina P. S. (2018). Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahetra ( Uppks ) Di Pekon Wates Kecamatan Balik. *Jurnal Pembangunan Pedesaan*.